**PENGARUH PEMAHAMAN PERANGKAT DESA, PERAN PERANGKAT DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN SISTEM KEUANGAN DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi Kasus di Kecamatan Sewon, Bantul, DI Yogyakarta)**

**THE EFFECT OF UNDERSTANDING VILLAGE EQUIPMENT, THE ROLE OF VILLAGE EQUIPMENT, GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM AND VILLAGE FINANCIAL SYSTEM ON VILLAGE FUND MANAGEMENT ACCOUNTABILITY**

**(Case Study in Sewon District, Bantul, DI Yogyakarta)**

Gastuti1 & Rochmad Bayu Utomo2Universitas Mercu Buana Yogyakarta17061044@student.mercubuana-yogya.ac.id , [bayu@mercubuana-yogya.ac.id](mailto:bayu@mercubuana-yogya.ac.id)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perangkat desa, peran perangkat desa, sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sewon. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan populasi pada penelitian ini adalah perangkat desa yang ada di kecamatan Sewon. Sampel ditentukan dengan menggunakan non-probability sampling dengan jumlah 40 responden. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.Hasil pengujian hipotesis yang telah digunakan dengan menggunakan rumus analisis regresi linier berganda menunjukan bahwa Pemahaman perangkat desa, Peran perangkat desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci** : Pemahaman perangkat desa, Peran perangkat desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Sistem Keuangan Desa, Akuntabilitas

*ABSTRACT*

*This study aims to determine the effect of understanding the village apparatus, the role of the village apparatus, the government's internal control system and the village financial system on the accountability of village fund management in Sewon District. The research method used in this study is a quantitative research method, the data sources used in this study are primary data and the population in this study is village officials in Sewon sub-district. The sample was determined using non-probability sampling with a total of 40 respondents. Methods of data collection by using a questionnaire. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of hypothesis testing that have been used using the multiple linear regression analysis formula show that the understanding of village officials, the role of village officials, the Government Internal Control System, and the Village Financial System has a positive effect on the accountability of village fund management.*

***Kata Kunci*** *: Understanding of village apparatus, Role of village apparatus, Government Internal Control System, and Village Financial System, Accountability.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya tinggal di pedesaan. Dalam situs Badan Pusat Statistik (BPS, 2018), mengatakan bahwa Indonesia memiliki 83.344 desa. Desa merupakan organisasi yang paling dekat dan berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat-perangkat desa. Tugas dari kepala desa sendiri adalah melaksanakan pemerintahan desa, memberdayakan masyarakat serta melakukan peningkatan dalam pembangunan desa. Undang-undang No. 6 tahun 2014 merupakan undang-undang yang mengatur mengenai desa. Peraturan Perundangan ini menjadi salah satu ciri dari *political will* yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan harapan dapat membuat atau memberikan perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat dan mendorong gerakan serta partisipasi masyarakat desa.

(Mudarosatun, 2017) menjelaskan pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Indrawati (2017) dalam buku pintar dana desa untuk kesejahteraan rakyat mengatakan bahwa dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD) dan selanjutnya ke Desa (APBDes). Dalam mendanai kebututuhan desa juga terdapat alokasi dana desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari APBD yaitu minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentraliasi. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1 dana desa juga bersumber dari pendapatan asli desa, dana desa yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Desa (PDRD) Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, serta pendapatan desa yang sah lain-lain.

Saat ini semakin banyak pemberitaan media yang membahas mengenai penggelapan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa baik kepala desa, Bendahara Desa, dan lain-lain. Anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya melalui anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari tahun ke tahun semakin besar yang menjadi salah satu faktor makin marak terjadinya penyelewengan dalam penggunaan dana desa. Berdasarkan kajian dan pemantauan ICW, pada tahun 2015-2019, kepala desa menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi di desa menunjukkan peningkatan. Tahun 2016- 2017 sebanyak 110 kepala desa jadi tersangka, sedangkan tahun 2018 ada 102 tersangka (Ihsanuddin, 2018).

Data ICW menunjukkan terdapat 46 kasus korupsi dana desa selama tahun 2019 yang merugikan negara hingga Rp 32,3 miliar. Menurut ICW (Ihsanuddin, 2018a) berbagai faktor menjadi penyebab korupsi di sektor desa, diantaranya karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas tersebut yaitu minimnya pengetahuan dari aparatur desa, tidak adanya transparansi dana, dan kurangnya pengawasan dari pihak kecamatan. Oleh sebab itu, ICW menyarankan untuk pengelolaan dana desa dibuat satu pintu dan terjadi transparansi sehingga kasus-kasus korupsi dapat diminimalisir (Ihsanuddin, 2018).

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Untuk mendukung sebuah keberhasilan akuntabilitas dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang mempengaruhi dari aspek tersebut (Widyatama, 2017). Widyatama et al, (2017) mengatakan bahwa pemahaman yang dimiliki aparatur pemerintahan turut mempengaruhi akuntabilitas pemerintah desa. Beliau juga memberikan argumennya yang menyebutkan bahwa faktor yang menentukan akuntabilitas suatu pemerintahan adalah implementasi peranperangkat desa. Faktor yang tidak kalah penting adalah sistem pengendalian internal, dalam pemerintahan disebabkan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal, pemerintah desa dapat berimplikasi pada akuntabilitas pemerintah desa. Faktor selanjutnya yaitu sistem keuangan desa sangat berperan penting pada organisasi pemerintah desa.

Faktor pertama yaitu pemahaman perangkat desa. Pemahaman yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan denga maksimal. Pemahaman aparatur mejadi suatu faktor yang penting untuk dibahas mengingat pemahaman merupakan faktor internal dan menjadi suatu yang penting. Pemahaman aparatur di pemerintah desa tergolong masih sangat lemah ketika harus mengelola alokasi dana desa (ADD) yang terbilang cukup besar. Penelitian yang dilakukan oleh (Setiana & Yuliani, 2017) menyatakan bahwa pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian (Masruhin & Kaukab, 2019) yang menyatakan bahwa pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun Berdasarkan hasil penelitian (Mada, 2017), yang menyebutkan bahwa pemahaman perangkat desa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yaitu peran perangkat desa. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang membantu kepala desa melakukan pembinaan administrasi dan memberkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh organisasi desa. Peran aktif dari setiap perangkat desa dituntut harus maksimal untuk menghindari terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, syarat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran desa tersebut harus terpenuhi. Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, aparatur pemerintah desa yang terkait harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan memadai, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Purba, 2020) menyatakan bahwa peran perangkat desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pengendalian dalam pemerintahan, disebabkan adanya sistem pengendalian dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah Desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa tersebut. Sistem pengendalian internal yang merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan publik, dinilai masih belum mampu untuk dapat memberikan akuntabilitas publik dengan adanya opini dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah. (Arfiansyah, 2020) menunjukan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Walyati & Farida, 2020) yang menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolan Dana Desa. Hasil penelitian ini berbeda dengan (Widyatama et al., 2017) menunjukan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor selanjutnya yaitu Sistem Keuagan Desa. Akuntabilitas juga membutuhkan adanya pengelolaan keuangan desa yang maksimal direncakan dari aparatur desa sehingga dapat mempertangungjawabkan hasil kepada pemerintah dan masyarakat. Penggunaan sistem keuangan dalam sebuah organisasi sangat dibutukan karena adanya pengolahan transaksi harian sebagai suatu strategi harian dalam organisasi dan dapat menyajikan laporan-laporan yang berkualitas kepada pihak yang membutuhkan. Penggunaan sistem keuangan dengan bantuan aplikasi dalam komputer akan sangat mempermudah aparatur desa dalam menyelesaikan pekerjaanya untuk membuat pelaporan dan hasil pertanggungjawaban secara cepat dan benar. Penelitian yang dilakukan oleh (Saragih & Kurnia, 2019) menyatakan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil uji dari beberapa penelitian terdahulu yang tidak konsisten mendukung peneliti untuk menguji kembali dengan objek yang berbeda. Peneliti mengambil objek akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sewon sebagai objek penelitian, karena Desa yang terletak di Kecamatan Sewon mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terus bertransformasi menjadi Desa yang mandiri. Hal ini dapat dilihat dari prestasi yang telah diraih oleh salah satu desa yang ada di Kecamatan Sewon yaitu Desa Panggungharjo. Beberapa prestasi yang telah diraih seperti juara 1 nasional, lomba desa, lima nominator penerima Eagle Award, juara 1 nasional lomba posyandu, serta prestasi lainnya di tingkat provinsi maupun kabupaten (Aji, 2017). Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan dana desa dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa, Peran Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sewon”.**

**LANDASAN TEORI**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan mengenai hubungan yang jelas antara akuntabilitas dengan teori agensi. Secara singkatnya, kepala desa beserta aparatur desa harus benar-benar dapat bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh sumber daya yang ada serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi adalah langkah untuk memberikan seluruh informasi keuangan secara jujur dan terbuka dengan pertimbangan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahuinya secara terbuka, menyeluruh atas informasi pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada kepala desa beserta aparaturnya dan ketaatannya akan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan akuntabilitas dan transparansi membutuhkan dukungan agar dapat berhasil. Keberhasilan kedua aspek tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya pemahaman dari aparatur pemerintahan yang dapat mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah desa.

**METODE**

Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan di kecamatan Sewon, kabupaten Bantul, Derah Istimewa Yogyakarta tahun penelitian periode 2021. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini menggunakan non-probability sampling yakni sampel tersedia (Accidental Sampling) atau disebut juga Teknik konvenien (convenience sampling).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Pemahaman Perangkat Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan perhitungan oleh SPSS 23 pada tabel 4.10 menunjukan bahwa nilai p value sebesar 0,000 terhadap taraf kesalahan 10% atau 0,1. Hasil tersebut menunjukan bahwa nilai 0,000 lebih kecil dari taraf kesalahan yaitu 0,1 (0,000 < 0,1) maka hipotesis diterima. sehingga mendapatkan hasil yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1. Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan perhitungan oleh SPSS 23 pada tabel 4.10 menunjukan bahwa nilai p value sebesar 0,092 terhadap taraf kesalahan 10% atau 0,1. Hasil tersebut menunjukan bahwa nilai 0,092 lebih kecil dari taraf kesalahan yaitu 0,1 (0,092 < 0,1) maka hipotesis diterima. sehingga mendapatkan hasil terdapat pengaruh positif dan signifikan antara peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan perhitungan oleh SPSS 23 pada tabel 4.10 menunjukan bahwa nilai p value sebesar .0,029 terhadap taraf kesalahan 10% atau 0,1. Hasil tersebut menunjukan bahwa nilai 0,029 lebih kecil dari taraf kesalahan yaitu 0,1 (0,029 < 0,1) maka hipotesis diterima. sehingga mendapatkan hasil terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1. Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan perhitungan oleh SPSS 23 pada tabel 4.10 menunjukan bahwa nilai p value sebesar 0,011 terhadap taraf kesalahan 10% atau 0,1. Hasil tersebut menunjukan bahwa nilai 0,011 lebih kecil dari taraf kesalahan yaitu 0,1 (0,011 < 0,1) maka hipotesis diterima. sehingga mendapatkan hasil terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Menambah variabel-variabel lain selain variabel yang sudah diteliti seperti transparansi, partisipasi masyarakat dan lain sebagainya, umtuk menjelaskan lebih spesifik faktor – faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas penelitian dengan dapat menggunakan metode yang berbeda seperti metode kualitatif seperti wawancara secara langsung agar informasi yang didapatkan secara lengkap dan akurat. Karena peneliti hanya penyebaran kuesioner ke beberapa responden belum keseluruhan sehingga informasi yang diperoleh belum secara detail.
3. Pemilihan responden harus diperhatikan yaitu pihak yang benar-benar mewakili pemerintah desa yaitu kepala desa sebagai pemegang kuasa atas dana desa di pemerintahan desa atau perangkat desa sebagai operator pelaksana dana desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terha- dap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, *3*(1), 67–82. Retrieved from http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa/article/view/2369

BPS. (2018). *Informasi Statistik Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Fajar Budi Aji. (2017). *Desa Panggungharjo: Desa Budaya Kaya Akan Kesenian dan Tradisi*. Retrieved from (panggungharjo.desa.id).

Ihsanuddin. (2018a). *ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar*. Retrieved from http://www.nasional.kompas.com

Ihsanuddin. (2018b). *Pemantauan ICW, pada tahun 2015-2019, kepala desa menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi di desa menunjukkan peningkatan*.

Indrawati. (2017). *Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf

Mada, S., Kalangi, L., dan Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 106–115.

Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, *1*(1), 118–130.

Mudarosatun. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Di Kabupaten Ponorogo)*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Purba, S. (2020). PENGARUH PEMAHAMAN DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, *3*(1), 10–19.

Saragih, N. S., & Kurnia, D. (2019). Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang. *Juma Unsera*, *1*(1), 1–9.

Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa se-Kecamatan Mungkid). *Urecol (University Research Colloquium*, 205–210. Retrieved from http://journal.ummgl.ac.id/index.php/urecol/article/view/1410

Walyati, F. N., & Farida. (2020). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Kecamatan …. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 270–285.

Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *2*(2), 1–20. https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762